

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dakwah *amar makruf nahi munkar* dan *tajdid* (pembaruan) cukup serius dalam mereformasi bentuk-bentuk dakwahnya.¹ Dalam artian, Muhammadiyah telah mulai mencari bentuk dakwah yang baru, diluar dari tradisi dakwah yang selama ini dilakukan oleh umat islam pada umumnya yakni *dakwah bil lisan, dakwah bil hal, dan dakwah bil kitabah*. Dakwah yang dilakukan Muhammadiyah adalah dengan cara dakwah sosial, yaitu dakwah yang tidak hanya melibatkan masalah akidah dan ibadah saja, namun juga permasalahan lainnya yang lebih kompleks seperti masalah kesenjangan sosial, kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan umat islam. Selain berfokus pada dakwah sosial, Muhammadiyah juga identik dengan dakwah di bidang pendidikannya. Dalam catatan sejarah, pendidikan menjadi cikal bakal dari berdirinya organisasi Muhammadiyah², tepatnya ketika KH Ahmad Dahlan bergabung dengan gerakan Budi Oetomo (BO) pada tahun 1909. Sebagai anggota, KH ahmad dahlan ikut mengajar di Kweekschool yang dikelola oleh BO cabang Yogyakarta yang berada di jetis dan OSVIA yang berada di magelang, disana beliau diberi kesempatan untuk mengajar ilmu agama islam.³ Peristiwa tersebut menjadi sejarah dan pengalaman pertama ilmu agama islam diajarkan dalam ruang kelas sekolah.⁴

Kini, Muhammadiyah telah berusia lebih dari satu abad. Selama itu, Muhammadiyah telah berkontribusi sangat banyak dalam proses perkembangan pendidikan di Indonesia. Muhammadiyah telah mendirikan banyak sekali lembaga pendidikan mulai dari tingkat pendidikan kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Saat ini, Muhammadiyah tercatat memiliki 172 perguruan tinggi, 1.407 pendidikan menengah akhir, 1.826 pendidikan menengah, 2.766 pendidikan dasar, dan lebih dari 22.000 pendidikan kanak-kanak.⁵ Selama satu abad terakhir ini, Muhammadiyah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal usaha

¹ Sahrul, "Pemikiran Dakwah Sosial", *Analytica Islamica*, Vol. 1, No. 2, 2012. Hal. 294.

² Suyatno dkk, "Revitalisasi Pendidikan Muhammadiyah di Tengah Persaingan Nasional dan Global", (Jakarta: Uhamka Press, 2010), hal. 299.

³ Wahyu Legono, "Lembaga Pendidikan Muhammadiyah: Telaah Pemikiran KH Ahmad Dahlan Tentang Pembaruan Pendidikan Diindonesia", *Islamadina*, Volume 19, No. 1, Maret 2018. Hal. 48.

⁴ Ibid

⁵ Dikdasmennppmuhammadiyah.org, "Jumlah lembaga pendidikan muhammadiyah", <https://dikdasmennppmuhammadiyah.org/>, diakses pada 29 September 2023.

yang dikelolanya seiring dengan perkembangan zaman, terutama di bidang pendidikan. Selama perjalanan itu pula, banyak sekali pengaruh yang mewarnai proses perkembangan pendidikan Muhammadiyah seperti pengaruh sosial-politik di Indonesia, kebutuhan masyarakat, dan arus globalisasi.

Menurut Valentine, globalisasi merupakan sebuah proses kompleks yang melibatkan ekonomi, politik, geografis dan budaya dimana perpindahan manusia, organisasi, modal, ideologi, gerakan, dan diskursus semakin menyerupai bentuk transnasional dan mengglobal.⁶ Artinya, interaksi yang terjadi antar aktor di satu negara dengan negara lainnya semakin mudah, terintegrasi dan beragam. Secara tidak langsung, fenomena ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam hal ekonomi, politik, sosial dan budaya. Sejalan dengan hal itu, Anthony Giddens berpendapat bahwa globalisasi merupakan hubungan intensif yang terjadi di seluruh dunia yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya yang jauh, sehingga peristiwa yang terjadi di satu tempat dapat mempengaruhi peristiwa di tempat lainnya. Sebagai contoh, krisis ekonomi yang terjadi di satu tempat dapat mempengaruhi kondisi perekonomian di tempat lainnya. Seperti krisis ekonomi yang terjadi di Yunani pada tahun 2008 telah menyebabkan nilai mata uang Euro menjadi turun, hal ini tentu sangat berdampak terhadap perekonomian negara-negara di Eropa.

Isu globalisasi sebenarnya bukan bahasan yang baru dalam studi hubungan internasional, isu ini bahkan sudah muncul sejak era abad 16 dan juga 19. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang masif di abad 20 ini membuatnya sedikit berbeda. Perkembangan IPTEK ini menyebabkan munculnya aktor baru dalam hubungan internasional seperti *Multi National Corporation (MNC)*, *World Trade Organization (WTO)*, *Non-Governmental Organizations (NGOs)*, dan kelompok lain atau bahkan individu yang bergerak melewati batas-batas teritorial negara.⁷ Maka ketika interaksi global antar aktor terjadi secara intensif, hal tersebut dapat memberikan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap satu sama lainnya.

Adanya pengaruh globalisasi ini tentu memberikan tantangan dan peluang bagi para aktor internasional untuk saling terhubung dan saling mempengaruhi. Tantangan globalisasi menuntut masyarakat untuk mampu bersaing dengan cara memiliki karakter yang bersifat aktif, kompetitif, berkemajuan, dinamis, berkeunggulan, disertai dengan ketangguhan dalam

⁶ Allina Shymanska, "Valentine M. Moghadam: Globalization and Social Movement", Rowman & Littlefields Publisher, Vol. 14, No. 2 tahun 2020, hal. 95.

⁷ Marjorie Mayo, "Global Citizens; Social Movements & the Challenge of Globalization", (London: Zed Books, 2005), hal. 54.

menunjukkan jati diri bangsa.⁸ Meskipun Muhammadiyah telah berdiri lebih dari seabad, namun perkembangan organisasi ini di kancah internasional terlihat masih kurang. Berbeda dengan organisasi sejenis yang terbilang lahir lebih muda seperti *Gülen Movement* (1982) yang kini sudah tersebar hampir diseluruh penjuru dunia.⁹ Untuk itu, Muhammadiyah sebagai NGO yang merupakan salah satu aktor baru yang muncul dalam hubungan internasional berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi sosial saat ini. Dalam menghadapi tantangan dan peluang globalisasi, diperlukan gagasan baru dalam perkembangan ideologi maupun arah gerak Muhammadiyah. Maka kemudian muncullah gagasan Muhammadiyah untuk melakukan Misi Internasionalisasi.

Sama halnya dengan globalisasi, internasionalisasi dianggap sebagai sebuah proses meningkatnya hubungan transnasional antar aktor di berbagai negara yang saling berketergantungan sehingga meningkatkan intensitas hubungan dan interaksi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Selain itu, makna internasionalisasi juga dianggap sebagai sebuah proses terlibatnya organisasi dalam lingkungan interaksi global. Dalam hal ini, melalui Misi Internasionalisasi, Muhammadiyah berupaya untuk ikut berperan aktif dalam aktifitas dan interaksi global tersebut.

Sebenarnya, keterlibatan Muhammadiyah di dalam hubungan internasional bukanlah hal yang baru. Organisasi ini bahkan sudah banyak terlibat di berbagai aktifitas internasional dalam beberapa dekade terakhir seperti keterlibatannya dalam kegiatan kemanusiaan, menjaga perdamaian, advokasi, dan juga politik.¹⁰ Hal ini membuktikan bahwa sebelum dijadikan sebuah gagasan dalam putusan muktamar, dasar-dasar dan fondasi untuk melakukan internasionalisasi Muhammadiyah sudah dibangun sejak lama, dan apa yang menjadi buah pikir yang kemudian dicantumkan dalam poin-poin putusan muktamar mengenai misi internasionalisasi berangkat dari pengalaman muhammadiyah dalam mengikuti kegiatan dan interaksi skala internasional tersebut. Barulah pada Muktamar ke 47 tahun 2015, Muhammadiyah menjadikan internasionalisasi gerakan sebagai misi dan arah gerak organisasi yang akan dijalankan oleh Pimpinan selanjutnya. Misi tersebut merupakan upaya muhammadiyah untuk menjawab tantangan globalisasi dan untuk melebarkan sayap dakwah Muhammadiyah di kancah global. Dengan adanya Misi internasionalisasi yang dirumuskan

⁸ Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad kedua, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010, hal. 12.

⁹ Ahmad Najib Burhani, "*Muhammadiyah Berkemajuan: Pergeseran dari Puritanisme ke Kosmopolitanisme*", (Bandung: Mizan, 2016), hal. 158.

¹⁰ Iwan Satriawan dkk, "Peningkatan Peran Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah dalam Internasionalisasi Gerakan Muhammadiyah", *Jurnal Masyarakat Mandiri*, Vol.6, No. 4 Tahun 2022, hal. 3033.

dalam putusan Mukhtamar, maka gerakan internasionalisasi Muhammadiyah dapat lebih terkonsep dan terarah sesuai dengan tujuan dan cita-cita organisasi.

Menurut Ahmad Najib Burhani, proses internasionalisasi Muhammadiyah memiliki tiga konteks. Pertama, munculnya jaringan keorganisasian Muhammadiyah di luar negeri melalui kebijakan didirikannya PCIM. Kedua, internasionalisasi Muhammadiyah dalam hal keikutsertaan organisasi dalam berbagai aktifitas dan isu global. Ketiga, internasionalisasi Muhammadiyah dalam hal hubungan kerjasama yang terjalin antara lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah dengan lembaga pendidikan akademik global di berbagai negara.¹¹ Adanya PCIM merupakan wadah dan tombak dakwah Muhammadiyah dikancah Internasional. Tujuan didirikannya PCIM adalah untuk memperluas jaringan dan jangkauan internasional Muhammadiyah melalui kerjasama lintas negara di berbagai wilayah di dunia. Secara khusus, PCIM juga bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai kebaikan dan potensial yang dapat diterapkan untuk mengatasi seluruh tantangan global dan menghadirkan Islam yang sebenarnya. Sehingga, Islam dapat digambarkan sebagai agama yang menawarkan solusi terhadap permasalahan global sekaligus ramah dan progresif. Untuk mentransformasikan gerakan Islam berkemajuan di masyarakat yang menganut keyakinan Sekularisme (seperti Australia), PCIM berupaya untuk meningkatkan pengembangan kader dan dakwah di luar negeri dari kader-kader Muhammadiyah yang berstatus profesional dan mahasiswa.

Pengembangan kaderisasi dan dakwah tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, pengajian, diskusi keilmuan ataupun kegiatan lainnya yang mampu menjaga komitmen dan kebersamaan para kader. Hal ini perlu dilakukan agar kepemimpinan organisasi dan keberlanjutan kegiatan dakwah pemikiran Muhammadiyah dapat terjaga. Muhammadiyah juga berupaya melebarkan sayap dakwahnya melalui pembentukan amal usaha di berbagai bidang yang dapat dikelola oleh PCIM seperti bidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Selain untuk memperkuat posisi strategis PCIM dengan program pengabdian internasional, amal usaha juga berfungsi sebagai penyokong finansial PCIM dalam menjalankan program-programnya. Menurut Haidar Nasir, dengan adanya amal usaha, Muhammadiyah mampu untuk berbicara banyak soal konsep Islam rahmatan lil alamin, sebab manfaat yang didapat tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saja, tapi juga oleh seluruh umat manusia.¹²

¹¹ Ahmad Najib Burhani, "Internasionalisasi Muhammadiyah", Tabloid Kauman, Edisi 4: Maret-April 2015.

¹² Syifa, "*Muhammadiyah Menerjemahkan Makna Rahmatan Lil Alamin Lewat Amal Usaha*", <https://muhammadiyah.or.id/muhammadiyah-menerjemahkan-makna-rahmatan-lil-alamin-lewat-amal-usaha/>,

Pada penelitian kali ini, penulis akan membahas mengenai Internasionalisasi Muhammadiyah pada bidang pendidikan di Australia. Pada awalnya, internasionalisasi merupakan evolusi dari globalisasi di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Namun, di abad ke 21 ini, muncul gagasan baru mengenai internasionalisasi pendidikan. Hal ini disebabkan karena perkembangan IPTEK yang merupakan hasil dari proses pendidikan telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan suatu negara, kualitas pendidikan juga dianggap sebagai indikator untuk menilai maju atau tidaknya suatu negara. Oleh karena itu, saat ini setiap negara saling berlomba untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di negara mereka. Penyelenggaraan pendidikan dikatakan mengalami “internasionalisasi” apabila prosesnya melintasi batas negara berkat jaringan kerja sama, lalu mendirikan cabang lembaga pendidikan dari sebuah negara di negara lain, atau memberikan akses kepada pelajar dalam negeri ke lembaga pendidikan tinggi di luar negeri.¹³ Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi yang telah sukses dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, kini melebarkan sayap dakwahnya ke dunia internasional melalui misi internasionalisasi pendidikan. Salah satu upaya internasionalisasi pendidikan muhammadiyah adalah dengan mendirikan amal usaha dibidang pendidikan berupa sekolah-sekolah dengan berbagai tingkatan, mulai dari pendidikan kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Hingga saat ini, Muhammadiyah tercatat telah memiliki 3 lembaga pendidikan yang berada diluar negeri, diantaranya berada di Mesir, Malaysia, dan Australia.¹⁴ Untuk di Australia, Muhammadiyah melalui PCIM Australia mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama *Muhammadiyah Australia College (MAC)*. MAC adalah lembaga pendidikan Muhammadiyah setingkat Sekolah Dasar (SD) yang berada di Melbourne, Australia. Sekolah ini resmi berdiri setelah mendapat izin operasi dari pemerintah Australia pada 21 Desember 2021. Sejak saat itu, MAC resmi beroperasi dengan mengajar 36 orang siswa angkatan pertama.¹⁵

Pendirian MAC merupakan upaya PCIM Australia untuk melaksanakan Misi Internasionalisasi Muhammadiyah dalam mendakwahkan islam yang *rahmatan lil alamin*, yakni mengenalkan konsep islam sebagai agama yang menjadi sumber kebaikan bagi seluruh

diakses pada 21 September 2023.

¹³ Moh. Wayong, “Menuju Era Globalisasi Pendidikan: Tantangan dan Harapan bagi Perguruan Tinggi di Tanah Air”, Jurnal Inspiratif Pendidikan, Vol. VI, No. 2, Tahun 2017, hal. 225.

¹⁴ Nuryanto, “*Muhammadiyah Buka Sekolah di Australia, Muhammadiyah Australia College (MAC)*”, <https://www.tvonenews.com/daerah/yogyakarta/58670-muhammadiyah-buka-sekolah-di-australia-muhammadiyah-australia-college-mac>, diakses pada 20 September 2023.

¹⁵ Afandi, “*Muhammadiyah Australia College, Kisah Beli Bangunan Jutaan Dolar dan Kurikulum Victorian*”, <https://muhammadiyah.or.id/muhammadiyah-australia-college-kisah-beli-bangunan-jutaan-dolar-dan-kurikulum-victorian/>, diakses pada 21 September 2023.

alam melalui pandangan keislaman Muhammadiyah yang moderat dan berkemajuan. Aktualisasi PCIM Australia dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil alamin* di negeri kanguru ini tidak hanya diwujudkan dengan membentuk lembaga pendidikan saja, namun juga dengan cara membuka kesempatan yang lebar bagi siapa saja yang berminat untuk mengenyam pendidikan keislaman di MAC. Hal tersebut dibuktikan dengan lingkungan yang multikultural, baik dari segi kurikulum pendidikan yang menggabungkan antara pendidikan agama islam dan pendidikan formal di Australia, juga dari segi pengajar dan muridnya. Tercatat 20% murid angkatan pertama merupakan keturunan indonesia, sedangkan 80% lainnya berasal dari berbagai negara bangsa, diantaranya Pakistan, India, Bangladesh, Lebanon, Turki, Maroko, dan dari penduduk asli Australia yang sudah *mualaf*.¹⁶

Melalui lembaga pendidikan, Muhammadiyah memiliki peluang strategis untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islam berkemajuan yang moderat dan damai kepada masyarakat Australia. Dengan pendekatan pendidikan, Muhammadiyah dapat membentuk pemahaman yang lebih inklusif dan terbuka tentang Islam, sekaligus membangun citra positif sebagai agama yang mengedepankan toleransi, perdamaian, dan kemajuan. Kehadiran lembaga seperti Muhammadiyah Australia College (MAC) menjadi bukti nyata bagaimana pendidikan dapat dijadikan sebagai sarana dakwah yang efektif, menanamkan nilai-nilai Islam Wasathiyah kepada generasi muda, serta membangun hubungan harmonis dengan komunitas lokal di Australia.

Penulis memilih PCIM Australia sebagai subjek penelitian kali ini karena negara Australia sendiri memiliki sudut pandang yang berbeda berkaitan dengan dakwah pemikiran dan misi internasionalisasi pendidikan Muhammadiyah. Internasionalisasi Muhammadiyah di Mesir maupun Malaysia bisa dikatakan jauh lebih mudah, karena kedua negara tersebut memiliki banyak kesamaan, baik dari segi kultural sebagai saudara serumpun dengan Malaysia, maupun dari segi keyakinan dimana kedua negara ini merupakan negara dengan mayoritas muslim. Sedangkan internasionalisasi muhammadiyah di Australia jauh lebih sulit karena memiliki tantangannya tersendiri. Pertama, islam sebagai agama minoritas. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2021, jumlah penduduk yang beragama muslim di australia tercatat sebanyak 813. 392 jiwa, atau 3,2 % dari jumlah total penduduk australia.¹⁷ Dengan jumlah tersebut, maka tentu saja islam menjadi agama minoritas di Australia. Kedua,

¹⁶ Farrez El Dacca, "Mengenal Lebih Baik Muhammadiyah Australia College", <https://buset-online.com/mengenal-muhammadiyah-australia-college/>, diakses pada 21 September 2023.

¹⁷ Yasmira Shofa, "Jumlah Muslim Australia Terus meningkat kini 813.392", Liputan 6, <https://www.liputan6.com/islami/read/5264583/jumlah-muslim-di-australia-terus-meningkat-kini-813392-berapa-lama-durasi-puasa-ramadhan?page=2>, diakses pada 18 Oktober 2023.

Islamophobia. Meskipun Australia merupakan negara sekuler, namun masih banyak penduduk yang phobia terhadap islam, khususnya generasi tua. Sehingga permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi muhammadiyah untuk berdakwah ditengah-tengah pemikiran tersebut. Ketiga, rasisme dan diskriminasi. Akibat dari minoritas islam dan munculnya pemikiran islamophobia, maka umat muslim akan rentan untuk mendapatkan perlakuan rasisme dan distriminasi dari penduduk mayoritas. Keempat, perbedaan budaya. Australia merupakan negara multikultur yang mencakup penduduk asli dan pendatang dari sekitar 200 negara. Penduduk asli negara ini adalah suku aborigin, namun semenjak kedatangan Eropa menjadikan Australia menjadi negara yang multikultur. Kelima, perbedaan pemikiran antar sesama muslim. Meskipun memiliki keyakinan yang sama, namun umat muslim di Australia cenderung ketakot-kotakkan berdasarkan etnis dan pemahaman agama dari negara asalnya masing-masing. Seperti muslim Turki, muslim Albania, muslim Pakistan, muslim India dan lain-lain.

Berdasarkan tantangan dan peluang diatas, maka bahasan mengenai internasionalisasi pendidikan Muhammadiyah di Australia ini menarik untuk diulas. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mencari tahu mengenai peran-peran yang lakukan oleh PCIM Australia dalam melakukan internasionalisasi Muhammadiyah di bidang pendidikan. Pengalaman dakwah Muhammadiyah di Australia melalui PCIM ini dapat memperkaya literatur umat islam mengenai perjalanan *dakwah islamiyah* di negara dengan minoritas muslim, diterimanya Muhammadiyah dengan baik sebagai komunitas muslim dapat menjadi bukti bahwa pendekatan yang Muhammadiyah lakukan itu efektif dan tepat sesuai dengan kondisi sosial yang ada disana. Kesuksesan dakwah Muhammadiyah di Australia juga dapat menjadi kebanggaan tersendiri sehingga mampu meningkatkan kualitas dan legitimasi Muhammadiyah ditingkat lokal hingga internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan mengenai, “Bagaimana Peran PCIM Australia dalam Melakukan Internasionalisasi Pendidikan Muhammadiyah?”.

C. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Internasionalisasi Muhammadiyah

Konsep internasionalisasi sering kali dikaitkan dengan globalisasi dalam studi hubungan internasional karena keduanya melibatkan proses interaksi dan keterhubungan antara negara, organisasi, dan masyarakat di seluruh dunia. Namun, meskipun terkait erat, internasionalisasi dan globalisasi memiliki nuansa dan fokus yang berbeda dalam konteks hubungan internasional.

Secara pengertian, internasionalisasi dapat didefinisikan dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, pendidikan, dan organisasi, tetapi umumnya internasionalisasi melibatkan peningkatan keterlibatan atau integrasi internasional dalam berbagai bentuk. Dalam konteks ekonomi misalnya, Beamish mendefinisikan internasionalisasi sebagai "proses di mana perusahaan meningkatkan keterlibatan internasional mereka secara bertahap dan mengalokasikan sumber daya mereka untuk kegiatan di luar pasar domestik mereka".¹⁸ Artinya, internasionalisasi melibatkan strategi perusahaan untuk memperluas pasar dan meningkatkan operasi internasional melalui berbagai bentuk keterlibatan seperti ekspor dan investasi asing. Sedangkan dalam konteks pendidikan, Hans de Wit mendefinisikan internasionalisasi sebagai "proses berbagai lembaga pendidikan tinggi merespons tantangan globalisasi dengan menyesuaikan struktur, kurikulum, dan strategi mereka untuk meningkatkan kualitas dan daya saing internasional".¹⁹ De Wit melihat internasionalisasi sebagai respons strategis dari lembaga pendidikan terhadap globalisasi, di mana institusi tersebut mengadopsi pendekatan yang lebih global dalam pendidikan, termasuk pengembangan program studi internasional, pertukaran akademik, dan kemitraan global.

Dari kedua definisi di atas, maka kita dapat memaknai internasionalisasi secara luas sebagai sebuah proses di mana entitas, seperti organisasi, lembaga, perusahaan, atau bahkan negara, mengembangkan keterlibatan dan pengaruh di luar batas-batas geografis atau budaya mereka. Internasionalisasi melibatkan integrasi atau interaksi yang lebih besar dengan aktor-aktor, pasar, atau komunitas internasional melalui pertukaran ide, produk, layanan, teknologi, dan budaya. Fenomena dapat mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan perdagangan internasional, kerja sama pendidikan lintas negara, diplomasi, ekspansi bisnis, dan pertukaran budaya. Internasionalisasi bukan hanya tentang kehadiran fisik di berbagai negara saja, tetapi juga tentang membangun hubungan yang berkelanjutan, memahami konteks global, dan

¹⁸ Jonathan L. Calof and Paul W. Beamish, *Adapting to foreign markets: Explaining internationalization*, *International Business Review*, vol. 4, issue 2, Page 115-131.

¹⁹ Hans De Wit, *Internationalization of Higher Education: The Need for a More Ethical and Qualitative Approach*, *Journal of International Student of Boston College*, Volume 10, Issue 1(2020), pp. i-iv.

menyesuaikan strategi serta praktik dengan dinamika internasional. Sedangkan dalam konteks Muhammadiyah, internasionalisasi berarti proses di mana organisasi ini memperluas pengaruh, misi, dan kegiatan dakwahnya ke luar negeri, di luar batas-batas Indonesia. Internasionalisasi ini mencakup berbagai upaya untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam berkembang yang diusung oleh Muhammadiyah, seperti gerakan pembaharuan, pemurnian ajaran Islam, dan pengembangan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial di tingkat global.

Proses internasionalisasi muhammadiyah ini melibatkan pendirian Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) di berbagai negara, serta pengembangan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), seperti sekolah, universitas, dan layanan sosial di luar negeri. Internasionalisasi Muhammadiyah juga berarti memperkuat jaringan dan kerja sama dengan komunitas Muslim internasional, berkontribusi pada pengembangan Islam yang moderat dan progresif, serta membangun peran Muhammadiyah sebagai aktor global dalam bidang pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Dengan internasionalisasi, Muhammadiyah tidak hanya berusaha memperluas dakwahnya tetapi juga berperan dalam membangun hubungan antarbangsa dan memberikan kontribusi nyata pada masyarakat global melalui program-program yang mencerminkan misi dan visi organisasi.

Internasionalisasi yang muhammadiyah lakukan juga berbeda dengan gerakan islam transnasional atau transnasionalisasi, seperti gulen movement misalnya. Internasionalisasi sering dilakukan melalui pembentukan cabang atau anak perusahaan di negara lain. Setiap cabang ini dapat beroperasi dalam kerangka hukum dan budaya negara tempatnya berada, tetapi tetap terkait erat dengan organisasi pusat. Dalam hal ini, Muhammadiyah menggunakan pendekatan formal dan struktural dalam memperluas pengaruhnya. Internasionalisasi dilakukan melalui pembentukan PCIM di berbagai negara, serta melalui pengembangan AUM seperti sekolah dan lembaga dakwah. Muhammadiyah juga tetap memiliki hubungan yang kuat dengan negara asalnya, Indonesia. Internasionalisasi Muhammadiyah adalah bagian dari strategi yang diinisiasi oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah), yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan komunitas Muslim di luar negeri.

Sedangkan dalam transnasionalisasi, entitas dapat membentuk jaringan global yang terintegrasi, di mana interaksi antara anggota tidak lagi tergantung pada batasan negara. Gerakan transnasional sering kali melibatkan pertukaran informasi, sumber daya, dan pengaruh di seluruh dunia dengan cara yang lebih horizontal dan egaliter. Dalam hal ini, Gulen Movement menggunakan pendekatan berbasis jaringan dan non-pemerintah, dengan

mendirikan lembaga pendidikan, media, dan lembaga sosial di berbagai negara. Gerakan ini beroperasi secara independen dari negara asalnya dan bahkan mengalami konflik dengan pemerintah Turki, mereka dianggap sebagai gerakan terorisme yang harus diwaspadai.²⁰ Hal ini disebabkan karena pemikiran Fethullah Gülen yang terbuka terhadap dialog lintas agama dan ideologi, serta kesediaannya untuk berinteraksi dengan berbagai kelompok, termasuk mereka yang berbeda keyakinan, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan kelompok radikal. Salah satu momen yang paling menonjol adalah ketika Gülen bertemu dengan Paus John Paul II di Vatikan. Pertemuan ini dianggap kontroversial oleh beberapa kalangan radikal yang merasa terancam oleh pendekatan inklusif Gülen, yang mereka anggap dapat melemahkan posisi mereka dan mereduksi sikap eksklusif terhadap agama lain.²¹ Pertemuan antara Fethullah Gülen dan Paus John Paul II ini menjadi simbol dari komitmen Gülen terhadap dialog antaragama dan perdamaian dunia. Bagi Gülen, pertemuan tersebut bukan hanya sekadar diplomasi, tetapi juga upaya nyata untuk menjembatani kesenjangan antara berbagai agama dan budaya. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinannya bahwa dialog adalah kunci untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis.

Dalam memaknai Internasionalisasi Muhammadiyah, Ahmad Najib Burhani membaginya ke dalam tiga makna. Pertama, munculnya jaringan keorganisasian Muhammadiyah di luar negeri melalui kebijakan didirikannya PCIM. Kedua, internasionalisasi Muhammadiyah dalam hal keikutsertaan organisasi dalam berbagai aktifitas dan isu global. Ketiga, internasionalisasi Muhammadiyah dalam hal hubungan kerjasama yang terjalin antara lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah dengan lembaga pendidikan akademik global di berbagai negara.²²

Sedangkan Haedar Nashir memaknai internasionalisasi Muhammadiyah melalui tiga pola. Pola pertama adalah perluasan dakwah internasional Muhammadiyah melalui pendirian PCIM dan PCIA di awal era tahun 2000-an. Dalam hal ini, Muhammadiyah memilih Mesir sebagai negara pertama untuk mendirikan PCIM dan PCIA. Pola kedua adalah keterlibatan Muhammadiyah di dunia internasional dalam bentuk kerjasama dengan berbagai pihak diluar negeri, baik dengan lembaga-lembaga pemerintahan, non-pemerintah, ataupun organisasi internasional lainnya di berbagai bidang. Banyaknya kerjasama dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Muhammadiyah dengan berbagai pihak di dunia internasional ini menegaskan bahwa Muhammadiyah serius untuk melakukan internasionalisasi dakwah dan terlibat secara

²⁰ Novi Revolina Doriza, Maria Botifar, Deri Wanto, "Korelasi Antara Gülen Movement Dengan Pendidikan Di Indonesia", Jurnal Tunas Pendidikan, Vol. 5. No. 2 (Maret 2023).

²¹ Ibid

²² Ahmad Najib Burhani, "Internasionalisasi Muhammadiyah", Tabloid Kauman, Edisi 4: Maret-April 2015.

langsung dalam aktifitas internasional. Lalu pola ketiga internasionalisasi Muhammadiyah yang dimaknai oleh Haedar Nashir adalah perintisan Amal usaha Muhammadiyah (AUM) di luar negeri. Perintisan ini menjadi momen penting lahirnya era baru keterlibatan Muhammadiyah di dunia internasional.

Secara keseluruhan, internasionalisasi Muhammadiyah tidak hanya mencakup ekspansi organisasi ke berbagai negara, tetapi juga melibatkan peran aktif Muhammadiyah dalam berbagai forum global, kerjasama lintas batas, serta pengembangan amal usaha yang mencerminkan komitmen Muhammadiyah dalam dakwah dan kontribusi pada masyarakat global. Internasionalisasi ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah semakin menegaskan dirinya sebagai aktor global yang berpengaruh dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam yang moderat, pendidikan, dan kesejahteraan umat manusia di seluruh dunia.

2. Konsep Peran Non-Governmental Organization (NGO)

NGO adalah contoh keterlibatan dan kontribusi aktif masyarakat sipil terhadap kegiatan sosial. Selain itu, NGO juga dapat dianggap sebagai jenis gerakan sosial komunitas yang bekerja untuk mengatasi permasalahan seperti kemiskinan, degradasi lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan lain-lain. Tentu saja, anggota masyarakat yang memiliki keahlian dan minat terhadap topik yang diangkat oleh organisasi merupakan basis aktivis NGO. Mereka mendorong dan mengajak masyarakat yang lain untuk peduli terhadap kekhawatiran yang diangkat oleh NGO serta membantu mereka yang ingin berdonasi. Oleh karena itu, kegiatan utama NGO biasanya merupakan penggalangan bantuan amal dan pelayanan sosial.

Menurut David Lewis, pada dasarnya NGO memiliki 3 peran utama dalam upaya pembangunan masyarakat, diantaranya:²³

a. NGO sebagai Katalis

Dalam kategori ini, peran Katalis didefinisikan sebagai kemampuan NGO untuk menginspirasi, memberikan fasilitas atau berkontribusi terhadap perubahan pembangunan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan, cara pandang, dan pemikiran masyarakat. Salah satu bentuk peran katalis yang dimainkan oleh NGO adalah berfokus pada advokasi dan mencari pengaruh untuk menciptakan perubahan sosial, politik, atau lingkungan. NGO jenis ini bekerja dengan mempengaruhi kebijakan publik, menggalang dukungan masyarakat, dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu kritis melalui

²³ David Lewis dan Nazneen Kanji, "The Management of Non-Governmental Development Organization", (London: Routledge, 2009), hal. 68.

kampanye, lobi, dan pendidikan publik. Di sisi lain, ada juga NGO yang bertujuan untuk berinovasi dan menerapkan solusi baru terhadap permasalahan pembangunan. NGO jenis ini berfokus pada penciptaan dan penerapan metode atau teknologi baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mereka sering melakukan penelitian dan pengembangan untuk menemukan cara-cara efektif dalam mengatasi tantangan seperti akses air bersih, pendidikan berkualitas, atau layanan kesehatan yang memadai. Melalui proyek percontohan dan program inovatif, mereka menunjukkan praktik terbaik yang dapat direplikasi dan diadopsi oleh pemerintah atau organisasi lain.

Menurut Jenkins (1987: 267), advokasi adalah “setiap upaya untuk mempengaruhi keputusan elit institusi mana pun atas nama kepentingan kolektif”.²⁴ Dalam konteks ini, advokasi dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan strategis yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi kebijakan, peraturan, atau tindakan yang diambil oleh para pemegang kekuasaan, dengan tujuan untuk mencapai perubahan yang diinginkan demi kebaikan bersama. Advokasi sering kali melibatkan berbagai metode, seperti lobi, kampanye publik, penyusunan laporan penelitian, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Misalnya, sebuah NGO yang bekerja di bidang pendidikan dapat melakukan advokasi dengan berbagai cara untuk memperbaiki sistem pendidikan dan memastikan akses yang lebih baik bagi semua anak. Mereka juga mulai mengorganisir seminar, lokakarya, dan konferensi yang melibatkan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan inklusif dan membangun konsensus tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki sistem pendidikan. Dengan melakukan advokasi yang efektif, NGO ini berusaha memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari latar belakang ekonomi, budaya, atau geografis, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. NGO memainkan peran penting dalam mendesak perubahan kebijakan, meningkatkan kesadaran publik, dan menggerakkan sumber daya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif. Ketertarikan pada kerja advokasi NGO juga dapat dikaitkan dengan kerangka kerja 'tiga generasi' Korten dalam kaitannya dengan peran dan tujuan NGO, di mana NGO generasi ketiga bekerja sebagai katalis untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.²⁵ Dalam kerangka ini, NGO tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan atau penggerak perubahan di tingkat lokal tetapi juga sebagai

²⁴ Ibid, hal 98.

²⁵ Ibid.

pemimpin dalam mendorong perubahan sistemik yang lebih luas, dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan dampak jangka panjang yang berkelanjutan.

Contoh kedua dari peran katalis NGO adalah inovasi. Inovasi ini dapat dilakukan NGO dalam berbagai bentuk, tergantung pada kebutuhan dan konteks spesifik yang dihadapi. Beberapa inovasi mungkin terkait dengan pengembangan teknologi baru, seperti teknik *ecoprint* yang ramah lingkungan untuk industri tekstil, yang tidak hanya mengurangi polusi tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi komunitas lokal. Disisi lain, NGO mungkin mengembangkan serangkaian pengaturan organisasi untuk mengatasi masalah pembangunan. Misalnya, mendirikan pusat layanan terpadu yang menyediakan berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan di satu lokasi. NGO juga dapat mendirikan lembaga pendidikan berkualitas yang ditujukan untuk kaum marjinal. Misalnya, sekolah yang menawarkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal dan metode pengajaran yang inovatif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan membuka peluang yang lebih baik bagi siswa-siswa dari latar belakang yang kurang beruntung.

Inovasi lainnya dapat berupa perancangan metode perencanaan dan penelitian baru. NGO mungkin mengembangkan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan. Metode ini memastikan bahwa suara dan kebutuhan masyarakat diakomodasi, sehingga solusi yang dihasilkan lebih sesuai dan berkelanjutan. Inovasi-inovasi ini menunjukkan bagaimana NGO dapat bertindak sebagai katalis dalam mendorong perubahan positif. Dengan menciptakan solusi yang kreatif dan efektif, NGO tidak hanya menangani masalah-masalah yang ada tetapi juga membuka jalan bagi praktik-praktik baru yang dapat direplikasi dan diadaptasi di tempat lain. Peran katalis ini menjadi semakin penting di era globalisasi dan perubahan cepat, di mana tantangan pembangunan semakin kompleks dan memerlukan pendekatan yang inovatif dan kolaboratif.

Dengan perannya sebagai katalis, NGO tidak hanya mendorong perubahan lokal tetapi juga berperan penting dalam menginspirasi dan memfasilitasi transformasi yang lebih luas. Sebagai katalis, NGO berfungsi untuk mempercepat proses perubahan melalui berbagai strategi, termasuk advokasi, inovasi, dan pembangunan kapasitas. Selain itu, NGO bekerja untuk mengubah paradigma dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu kritis melalui kampanye publik dan pendidikan masyarakat. Dengan demikian, NGO menjadi agen perubahan yang tidak hanya berfokus pada solusi jangka pendek tetapi juga

menciptakan perubahan berkelanjutan dan berdampak luas, mempengaruhi kebijakan, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi semua orang.

b. NGO sebagai Implementer

Dalam kategori ini, peran NGO implementer didefinisikan sebagai mobilisasi sumberdaya dengan cara memberikan bantuan baik berupa barang ataupun jasa kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui proyek yang menjadi bagian dari agenda NGO atau program pendanaan dari pemerintah dan dari lembaga donor terkait. Mereka bertugas untuk merancang, mengelola, dan mengeksekusi berbagai kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan yang spesifik.

Peran Implementer ini merupakan hal yang penting karena banyak orang, khususnya di negara-negara berkembang, yang kesulitan untuk mendapatkan pelayanan dasar yang sangat penting seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, bantuan hukum, dan lain-lain.²⁶ Baik disebabkan oleh ketidakterediaan jenis-jenis pelayanan tersebut, atau karena kualitasnya yang buruk sehingga tidak bisa memberi mereka bantuan yang signifikan. Oleh sebab itu, banyak NGO dengan berbagai jenis dan kapasitas serta kompetensi dengan kualitas yang berbeda-beda, harus 'menggambil bagian' atau 'mengisi kekosongan' yang tersisa. Misalnya, dalam bidang pendidikan, NGO sering kali mendirikan sekolah atau program pelatihan untuk memastikan anak-anak dan orang dewasa di daerah terpencil mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Dalam layanan kesehatan, NGO dapat menyediakan klinik kesehatan, program imunisasi, dan kampanye kesehatan masyarakat untuk menjangkau komunitas yang kurang terlayani. Sementara dalam bantuan hukum, NGO mungkin memberikan layanan konsultasi hukum gratis atau advokasi bagi mereka yang tidak mampu membayar jasa pengacara.

Motivasi sebuah NGO untuk terlibat dalam memberikan layanan dapat bervariasi. Kadang-kadang, NGO melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang sebelumnya tidak terpenuhi oleh pemerintah atau sektor swasta.²⁷ Misalnya, di daerah-daerah terpencil atau miskin, akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan hukum mungkin sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Dalam situasi seperti ini, NGO berperan penting dalam mengisi kekosongan tersebut dan memastikan bahwa masyarakat yang paling membutuhkan dapat memperoleh layanan yang mereka perlukan. Di lain waktu, sebuah NGO mungkin 'dikontrak' oleh pemerintah, pendonor,

²⁶ Ibid, hal. 92.

²⁷ Ibid, hal. 93.

atau perusahaan untuk mengambil alih pemberian layanan yang sebelumnya disediakan oleh pemerintah. Hal ini sering terjadi ketika pemerintah menghadapi keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia, untuk secara efektif menjalankan program-program layanan publik. Dengan mengontrak NGO, pemerintah dan pihak lain dapat memanfaatkan keahlian, jaringan, dan fleksibilitas yang dimiliki oleh NGO untuk mencapai tujuan pelayanan yang lebih baik dan efisien.

Selain itu, beberapa NGO termotivasi oleh misi dan nilai-nilai organisasi mereka, seperti memperjuangkan hak asasi manusia, mempromosikan kesetaraan gender, atau ideologi berbasis keagamaan. Dalam konteks ini, memberikan layanan dasar menjadi cara untuk mewujudkan visi dan misi organisasi mereka. NGO yang berlandaskan ideologi keagamaan sering kali termotivasi oleh nilai-nilai spiritual dan etika yang mendasari agama mereka. Mereka mungkin terlibat dalam penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral untuk membantu sesama. Misalnya, Muhammadiyah mendirikan amal usaha di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan dan sosial sebagai bagian dari misi mereka untuk melayani umat manusia sesuai ajaran agama Islam, khususnya dalam konteks mengamalkan teologi *Al-Maun* yang mereka yakini. Dalam semua kasus ini, pemberian layanan dasar tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat tetapi juga untuk memperkuat dan menyebarluaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut oleh NGO tersebut. Dengan demikian, kegiatan layanan dasar ini menjadi sarana efektif untuk mempromosikan perubahan sosial yang lebih luas dan menciptakan dampak positif jangka panjang di komunitas tempat mereka beroperasi.

Dengan perannya sebagai implementer, NGO tidak hanya memberikan layanan dasar yang sangat diperlukan tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Mereka membantu menjembatani kesenjangan yang ada antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan pemerintah atau sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, melalui program-program mereka, NGO dapat membangun kapasitas lokal, memberdayakan komunitas, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

c. NGO sebagai Partner

Menjalin kemitraan dengan berbagai entitas kini menjadi elemen kunci dalam menentukan kebijakan pembangunan NGO. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk memanfaatkan sumber daya yang langka secara lebih efisien, meningkatkan

keberlanjutan kelembagaan, dan meningkatkan kualitas interaksi mereka dengan berbagai entitas. Kemitraan dalam konteks ini merujuk pada hubungan yang disepakati antara dua atau lebih lembaga dalam suatu proyek atau program, di mana mereka berbagi peran, tanggung jawab, risiko, dan tujuan bersama.²⁸ Misalnya, sebuah NGO mungkin bekerja sama dengan pemerintah, organisasi internasional, dan sektor swasta untuk menjalankan proyek pembangunan yang kompleks. Melalui kemitraan ini, setiap pihak membawa sumber daya, keahlian, dan jaringan mereka untuk mencapai hasil yang tidak dapat dicapai secara individu. Selain itu, kemitraan juga dapat dilihat sebagai *'buzzword'* atau kata kunci dalam kemajuan pembangunan yang unggul karena memiliki arti yang berbeda-beda bagi pelaku pembangunan yang berbeda. Bagi beberapa pihak, kemitraan mungkin diartikan sebagai efisiensi dan efektivitas, hal ini memungkinkan mereka untuk mencapai hasil yang lebih besar dengan sumber daya yang terbatas. Bagi yang lain, kemitraan bisa berarti kolaborasi dalam arti yang sebenarnya sehingga dapat mendorong adanya inovasi dan perubahan sistemik. Perbedaan perspektif ini menunjukkan bahwa sementara konsep kemitraan sangat dihargai dalam kebijakan pembangunan, interpretasi dan penerapannya dapat bervariasi tergantung pada tujuan, nilai, dan konteks lembaga yang terlibat.

Sebagai contoh, dalam studinya mengenai kemitraan dalam *aquaculture project* di Bangladesh, Lewis (1998) menemukan bahwa kemitraan yang dijelaskan dalam dokumen proyek tersebut lebih didorong oleh peluang untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya eksternal daripada oleh alasan-alasan 'saling melengkapi' atau 'logika fungsional'.²⁹ Hal ini berarti bahwa motivasi utama bagi NGO dan lembaga pemerintah untuk membentuk kemitraan tersebut bukanlah karena mereka memiliki kekuatan atau kemampuan yang saling melengkapi, atau karena kemitraan tersebut secara fungsional lebih efisien atau efektif untuk mencapai tujuan proyek. Sebaliknya, kemitraan ini justru terbentuk karena adanya insentif untuk memperoleh sumber daya tambahan, seperti dana atau teknologi, yang mungkin tidak dapat diakses jika bekerja secara mandiri. Dengan kata lain, kemitraan ini bersifat oportunistik, di mana kedua pihak melihat kemitraan sebagai cara untuk meningkatkan peluang mereka dalam mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk proyek mereka. Contoh ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, kemitraan yang tampaknya strategis dan fungsional di atas kertas sebenarnya didorong oleh kebutuhan pragmatis untuk sumber daya eksternal, daripada oleh perencanaan yang

²⁸ Ibid, hal. 113.

²⁹ Ibid.

didasarkan pada keunggulan masing-masing pihak atau alasan-alasan praktis lainnya yang mendukung kolaborasi tersebut.

Oleh sebab itu, Lewis kemudian membagi kemitraan dalam dua jenis utama, yakni *Active Partnerships* dan *Dependent Partnerships*.³⁰ *Active Partnerships* adalah bentuk kolaborasi yang dibangun melalui proses dinamis yang melibatkan negosiasi, perdebatan, dan sesekali konflik. Dalam jenis kemitraan ini, pembelajaran terjadi melalui trial and error, di mana kesalahan dan kegagalan dijadikan pelajaran untuk perbaikan. Mereka juga berani untuk mengambil resiko. Meskipun peran dan tujuannya jelas, risiko tersebut mungkin saja berubah kapanpun sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Kemitraan aktif cenderung lebih fleksibel dan adaptif, hal ini memungkinkan adanya perubahan strategi dan pendekatan berdasarkan pengalaman dan kondisi aktual. Selain itu, konflik kreatif juga sering kali muncu dimanan hal ini dapat mendorong terciptanya inovasi dan solusi baru. Sebaliknya, *Dependent Partnerships* memiliki karakter *blueprint*, yang berarti dirancang pada tahap perencanaan proyek dengan asumsi-asumsi kaku tentang keunggulan komparatif dan kepentingan masing-masing lembaga, jenis kemitraan ini biasanya terkait dengan pendanaan dari luar. Meskipun memungkinkan ada konsensus di antara para mitra, namun sering kali peran dan tanggung jawab masing-masing diantara mereka ini tidak jelas, hal ini berbeda dengan konflik kreatif yang dapat muncul dalam kemitraan aktif. Kemitraan ketergantungan cenderung lebih birokratis dan kurang fleksibel, dengan sedikit ruang untuk perubahan dan penyesuaian di tengah jalan.

Lewis juga menunjukkan bahwa kemitraan bisa menimbulkan biaya tambahan yang sering kali dianggap remeh, seperti munculnya jalur komunikasi baru yang membutuhkan waktu staf, kendaraan, dan jaringan komunikasi. Selain itu, tanggung jawab baru untuk staf tertentu, dan kebutuhan untuk berbagi informasi dengan lembaga lain juga menjadi hambatan yang mungkin muncul. Kesimpulannya, kemitraan aktif lebih dinamis dan adaptif, meskipun lebih kompleks dan berisiko, sedangkan kemitraan ketergantungan lebih terstruktur dan sering kali kurang fleksibel, dengan peran dan tanggung jawab yang mungkin tidak jelas. Pemilihan jenis kemitraan yang tepat bergantung pada konteks dan tujuan spesifik dari proyek atau program yang sedang dijalankan. Oleh karena itu, pemahaman dan pemilihan jenis kemitraan yang sesuai dengan konteks dan tujuan proyek sangat penting bagi NGO. Dengan demikian, NGO dapat lebih efektif dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, meningkatkan

³⁰ Ibid, hal. 114.

keberlanjutan kelembagaan, dan memperkuat interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan, memastikan bahwa mereka dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan penjelasan di atas dan dengan merujuk pada jenis kategori peran NGO menurut David Lewis, penulis akan menggunakan tiga model pendekatan untuk menjelaskan peran PCIM Australia dalam menjalankan misi internasionalisasi pendidikan. Ketiga peran tersebut meliputi: peran NGO sebagai katalis, peran NGO sebagai implementer, dan peran NGO sebagai partner. Pemaparan mengenai penerapan dari ketiga pendekatan peran ini akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Dalam perannya sebagai katalis, PCIM Australia berfungsi untuk mendorong perubahan dan inovasi melalui advokasi dan penciptaan pengaruh. Mereka berupaya menginspirasi dan menggerakkan komunitas untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pendidikan dan keagamaan, serta mempromosikan nilai-nilai Muhammadiyah. Melalui lobi, advokasi, dan pelatihan. PCIM Australia dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman para kader mengenai ilmu pengetahuan, agama, dan kemuhammadiyah. Mereka tidak hanya berperan dalam menyebarkan nilai-nilai Muhammadiyah, tetapi juga dalam mengembangkan kapasitas individu dan komunitas untuk membawa perubahan yang positif dan berkelanjutan. Kegiatan advokasi ini seringkali melibatkan pendekatan yang kreatif dan strategis, seperti mengadakan seminar, workshop, dan dialog interaktif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Selain itu, PCIM Australia berperan sebagai katalis dengan mendorong inovasi dalam berbagai aspek kehidupan komunitas Muslim di Australia. PCIM Australia juga aktif dalam menginisiasi program-program pelatihan kewirausahaan yang membekali para anggotanya dengan keterampilan praktis dan keahlian yang diperlukan untuk bersaing di pasar global. Melalui inisiatif-inisiatif ini, PCIM Australia tidak hanya memperkuat komunitas Muslim di Australia tetapi juga menciptakan model yang dapat direplikasi di negara lain, menunjukkan bagaimana sebuah organisasi dapat memainkan peran kunci dalam memfasilitasi perubahan sosial dan pendidikan yang berkelanjutan.

Sedangkan, dalam perannya sebagai implementer, PCIM Australia dapat mengambil tanggung jawab penuh dalam merancang, mengelola, dan mengeksekusi berbagai kegiatan yang mendukung tujuan pembangunan Muhammadiyah. Mereka memobilisasi sumber daya, baik dalam bentuk barang maupun jasa, untuk melaksanakan program-program pendidikan dan dakwah. Aktivitas ini mencakup penggalangan dana, penyediaan fasilitas, dan pelaksanaan proyek-proyek konkret dan berkelanjutan. Contohnya, mereka mengumpulkan dana dan dukungan dari berbagai pihak untuk mendirikan sebuah amal usaha. Dengan

adanya amal usaha ini, PCIM Australia dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial maupun menjadi pusat dakwah Muhammadiyah di Australia. Selain itu, PCIM Australia juga menunjukkan perannya sebagai implementer melalui pelaksanaan berbagai program pelatihan dan workshop yang dirancang untuk memberdayakan anggotanya. Misalnya, mereka mengadakan pelatihan kewirausahaan yang memberikan keterampilan praktis bagi para peserta, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan berkontribusi secara positif terhadap komunitas. PCIM Australia juga aktif dalam menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan keagamaan dan sosial, seperti membangun pusat komunitas dan tempat ibadah yang layak. Dengan pendekatan yang terstruktur dan terencana, PCIM Australia mampu menciptakan dampak nyata dan berkelanjutan dalam masyarakat, memperlihatkan bagaimana sebuah organisasi dapat menjadi motor penggerak dalam memajukan pendidikan dan dakwah di luar negeri.

Adapun perannya sebagai partner, PCIM Australia dapat menjalin kemitraan dengan berbagai entitas, baik lokal maupun internasional, guna memperkuat posisi dan pengaruh Muhammadiyah di luar negeri. Mereka membangun jaringan yang luas dan bekerja sama dengan organisasi lain untuk mengoptimalkan dukungan dan sumber daya yang tersedia. Misalnya, PCIM Australia berkolaborasi dengan PP Muhammadiyah atau Pemerintah Australia dalam menjalankan kegiatannya. Mereka juga dapat bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, seperti pengajian, festival Ramadhan, dan shalat Idul Fitri, yang membantu memperkuat hubungan antara komunitas Muslim di Australia. Selain itu, PCIM Australia memperluas jaringan dakwahnya dengan mendirikan organisasi otonom Muhammadiyah lainnya. Hal ini dapat memudahkan PCIM Australia dalam menyebarkan kebermanfaatannya dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Dengan adanya kemitraan strategis ini, PCIM Australia dapat mengakses berbagai bantuan, baik dalam bentuk finansial, teknis, maupun moral, yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Kolaborasi dengan organisasi internasional juga memungkinkan PCIM Australia untuk mendapatkan panduan strategis dan dukungan pendanaan yang lebih besar, sehingga mereka dapat menjalankan program-programnya dengan lebih efektif dan efisien. Melalui kemitraan yang solid dan strategis, PCIM Australia dapat menciptakan dampak yang signifikan dalam memajukan dakwah dan pendidikan Muhammadiyah di Australia, serta memperkuat jaringan komunitas Muslim di luar negeri.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan konsep NGO, karena penulis penting untuk mengidentifikasi terlebih dahulu apakah Muhammadiyah

termasuk dalam kategori NGO, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana perkembangannya dari tingkat lokal hingga internasional. Konsep perkembangan pembangunan NGO yang dikemukakan oleh Korten juga dianggap relevan dengan perkembangan Muhammadiyah sejak era pendiriannya hingga sekarang, di mana banyak faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhinya. Selain itu, penulis juga berpendapat bahwa konsep peran NGO dari David Lewis mampu menjelaskan bagaimana PCIM Australia berperan dalam melakukan pendidikan Muhammadiyah di Australia. Peran-peran penting yang dilakukan oleh PCIM Australia ini menjadi kunci kesuksesan Muhammadiyah dalam melakukan internasionalisasi pendidikan di Australia. Kesuksesan ini tentu perlu dibahas dan dipelajari dari pengalaman yang telah dilalui oleh PCIM Australia, sehingga dapat menjadi pelajaran berharga bagi upaya serupa di masa mendatang.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran yang telah disampaikan di atas, maka dapat diperoleh jawaban sementara bahwa PCIM Australia memainkan tiga peran penting dalam melakukan internasionalisasi pendidikan Muhammadiyah, diantaranya sebagai Katalis, Implementer, dan Partner:

1. Sebagai Katalis, PCIM Australia memberikan dorongan perubahan melalui inovasi, advokasi, dan penciptaan pengaruh. Mereka berupaya menginspirasi dan menggerakkan anggota komunitas untuk terlibat dalam kegiatan pendidikan dan keagamaan, serta mempromosikan nilai-nilai Muhammadiyah.
2. Sebagai Implementer, PCIM Australia mengambil tanggung jawab dalam merancang, mengelola, dan mengeksekusi berbagai kegiatan yang mendukung tujuan pembangunan Muhammadiyah. Mereka juga memobilisasi sumber daya, baik dalam bentuk barang maupun jasa, untuk melaksanakan program-program pendidikan dan dakwah.
3. Sebagai Partner, PCIM Australia menjalin kemitraan strategis dengan berbagai entitas, baik dalam skala lokal maupun internasional. Mereka membangun kemitraan yang solid melalui kerja sama dengan organisasi lain untuk memperkuat posisi dan pengaruh Muhammadiyah di luar negeri. Mereka juga memperluas jaringan dakwahnya dengan mendirikan organisasi otonom turunan lainnya, sehingga memudahkan PCIM Australia dalam menyebarkan kebermanfaatannya dengan cakupan wilayah yang lebih luas.

E. Metodologi Penelitian dan Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian terkait Internasionalisasi Pendidikan Muhammadiyah di Australia, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Susan E Wise, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat eksplorasi. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh pemahaman (*Understanding*) tentang alasan, opini, dan motivasi yang mendasari suatu perilaku. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh wawasan (*insight*) dalam suatu masalah serta membantu untuk mengembangkan ide-ide atau hipotesis dalam penelitian kualitatif.³¹ Peneliti juga menggunakan pendekatan studi kasus untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai upaya PCIM Australia dalam mendirikan Muhammadiyah Australia College (MAC). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali lebih dalam tentang proses, tantangan, dan strategi yang digunakan oleh PCIM Australia dalam mewujudkan tujuan mereka.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan data faktual tentang fenomena, peristiwa atau objek tertentu, untuk memperoleh pandangan atau pendapat dari peserta wawancara, atau untuk mempelajari lebih lanjut mengenai perilaku mereka.³² Kemudian data sekunder diperoleh melalui studi literatur berupa media online dan cetak seperti surat keputusan, laporan tahunan Muhammadiyah, berita, buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

Narasumber dipilih berdasarkan subjek yang memiliki informasi dan pengetahuan mengenai studi kasus yang akan dibahas. Narasumber yang dipilih yakni Bu Eko Purwanti, selaku salahsatu dosen UMY yang pernah menyelenggarakan kegiatan di PCIM Australia. Wawancara dilakukan secara tatap muka yang kemudian direkam menggunakan alat perekam. Selanjutnya adalah analisis terhadap seluruh data yang dihasilkan meliputi reduksi data, verifikasi data, interpretasi data, dan merangkum temuan penelitian berdasarkan analisis tersebut.

F. Jangkauan penelitian

Agar pembahasan dan analisis penelitian tidak melebar dari inti permasalahan, maka diperlukan batasan berupa jangkauan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan waktu dari tahun 2015-2023. Tahun 2015 adalah dimulainya amanat

³¹ Umar Suryadi Bakry, "*Metode Penelitian Hubungan Internasional*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 17.

³² Umar Suryadi Bakry, *op.cit.*, hal. 152.

internasionalisasi Muhammadiyah, sedangkan tahun 2023 merupakan perkembangan terbaru terkait Muhammadiyah Australia College.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian, maka diperlukan sistematika penulisan. Penelitian ini dibagi kedalam empat BAB, sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, Pada BAB ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan pengumpulan data, hipotesa, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Internasionalisasi Muhammadiyah dan Kemunculan PCIM
- BAB III : Peran PCIM Australia dalam Melakukan Internasionalisasi Pendidikan Muhammadiyah
- BAB IV : Kesimpulan dan penutup